

BAB IV

PERAN CIDA SEBAGAI DEVELOPMENT ASSISTANCE MELALUI PROGRAM AID EFFECTIVENESS

Dalam bab IV penulis akan menjelaskan mengenai bagaimana peran CIDA sebagai *development assistance* melalui *program aid effectiveness* dalam penanganan gempa bumi dan tsunami Aceh pada tahun 2009.

Kejadian tsunami Aceh pada 26 Desember 2004, telah merugikan negara yang terkena dampak dari bencana alam khususnya daerah Aceh. Selain itu Aceh mengalami pertumbuhan ekonomi yang rendah, hal ini dikarenakan Aceh memiliki sumber daya manusia yang melimpah tetapi pengelolaan sumber daya tersebut belum dikelola dengan baik. Selain itu adanya konflik saudara antar GAM dan Pemerintahan Indonesia yang telah berlangsung lama menyebabkan distribusi bantuan yang tidak dapat secara merata. Sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi negara pendonor maupun lembaga masyarakat.

Besarnya kerusakan memberikan tantangan besar dalam usaha menyalurkan bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi. Dalam proses rekonstruksi juga mengalami beberapa tantangan, dikarenakan konflik sosial, politik, dan ekonomi yang sedang berlangsung saat itu antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintahan Indonesia. Konflik tersebut diselesaikan melalui *Memorandum of Understanding* (MOU) yang ditanda tangani di Helsinki pada bulan Agustus 2005. Selain itu wilayah Sumatera Utara dan Aceh yang relatif cukup terpencil, dan CIDA tidak banyak pengalaman sebelumnya di dalam situasi wilayah

tersebut. Konsekuensi gabungan dari bencana tersebut dan konflik yang telah lama berjalan sangat memengaruhi semua sektor yang dibantu oleh CIDA. Hal yang sama berlaku bagi sebagian besar mitra-mitranya. Berikut jumlah dana yang dikeluarkan oleh CIDA dalam urutan 10 pedonor terbesar.

Tabel 4.1
10 Mitra CIDA Pedonor Terbesar Pasca Tsunami

Mitra Kerjasama	Jumlah Proyek	
	(\$CAD dalam Juta)	(IDR dalam Miliar)
Canadian Red Cross	66.100.000	635.700.000.000
Multi- Donor Fund for Aceh and Nias	28.000.000	269.200.000.000
Federation of Canadian Municipalities	8.700.000	84.000.000.000
World Bank	7.100.000	68.300.000.000
Asian Development Bank	5.000.000	64.400.000.000
United Nations Development Programme	6.200.000	59.600.000.000
International Organizations for Migration	5.500.000	64.400.000.000
Development and Peace	4.900.000	47.100.000.000
Canadian Cooperative Association	4.700.000	45.200.000.000
USC Canada	3.700.000	35.600.000.000
Total	\$.139.900.000	Rp.1.373.500.000.000

Sumber: Hasil wawancara dengan Mr. John Summerbell head of project Canadian International Development Agency, Joint Statement of Achievement: Tsunami Recovery Program.

Untuk penanggulangan bencana perlu adanya manajemen yang baik, karena harus ada Konsep Modal Sosial yang berperan sebagai alat terwujudnya pembangunan yang inklusif dan merata. Menurut Coleman, modal sosial merupakan suatu kerjasama antar masyarakat demi mencapai pada tujuan bersama dalam berbagai kelompok dan organisasi.¹

Dalam Modal Sosial menurut *Woolcock* memiliki tiga tipologi utama yaitu: *Bonding Social Capital*, *Bridging Social Capital* dan *Linking Social Capital*.

¹ Muh Aris Marfai dkk., "Peran Kearifan Lokal dan Modal Sosial dalam Pengurangan Risiko Bencana dan Pembangunan Pesisir", Gadjah Mada University Press, 2015, hlm 129

Dalam hal ini, setiap tipologi memiliki konsep modal sosial berbeda-beda yang sebagai berikut:²

- *Bonding Social Capital* merupakan modal sosial yang melekat kuat pada dan berasal dari internal masyarakat seperti kepercayaan, kearifan lokal, norma, organisasi, perkumpulan lokal dan sebagainya.
- *Bridging Social Capital* merupakan modal sosial yang berupa pembentukan komunitas-komunitas di dalam masyarakat untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.
- *Linking Social Capital* merupakan modal sosial yang berupa kerjasama antar level komunitas yang ada di masyarakat dengan *stakeholder* atau pemerintah.

Manajemen bencana yang dilakukan CIDA, sebagai lembaga bantuan dari pemerintahan Kanada dengan menggunakan konsep *Linking Social Capital* bisa berupa hubungan atau jaringan sosial yang memiliki karakteristik dengan adanya hubungan diantara beberapa lapisan masyarakat. Selain itu *Linking Social Capital* juga hasil dari lemahnya hubungan dengan pendekatan yang sebelumnya. Sehingga *Linking* lebih memprioritaskan pada hasilnya seperti menghubungkan menyediakan akses dan koneksi kekuasaan struktur dan lembaga. Tidak seperti ikatan hubungan kerjasama saja, namun juga sebagai jembatan dan penghubung yang ditandai oleh paparan dan pengembangan ide-ide baru, nilai dan perspektif.

Dalam pengembangan kapasitas pembangunan sebagian besar proyek, CIDA tidak hanya mengambil langkah dengan memberikan bantuan dalam bentuk uang tunai, perahu, rumah atau lainnya. Namun program yang bersifat jangka panjang

² Ibid

seperti penguatan individu, masyarakat dan pemerintah daerah dalam kemampuan mereka untuk kedepannya.³ *Development assistance*, merupakan lembaga yang berfokus pada perekonomian berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat di negara berkembang. Dalam perannya CIDA sebagai *development assistance* yaitu fasilitator pembangunan di negara berkembang. *Aid Effectiveness* program yang diterapkan pada negara Indonesia yaitu dengan fokus utama salah satunya yaitu pengentasan dalam kemiskinan dan pembangunan kembali Aceh

A. CIDA Aid Effectiveness di Aceh

Aid Effectiveness Program merupakan salah satu agenda CIDA dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan kembali Aceh pasca tsunami. Program ini berjalan selama empat tahun dan telah mengubah kehidupan di Aceh. Fokus utama program pembangunan kembali di Indonesia yang diantaranya dalam sektor pemerintahan, mengembalikan penghidupan berkelanjutan, membangun lagi pada fasilitas perumahan dan infrastruktur. Selain itu program ini juga berjalan pada beberapa kabupaten yang menjadi fokus utama yaitu Aceh Jaya, Pidie, Aceh Besar, Kota Banda Aceh dan Nias.

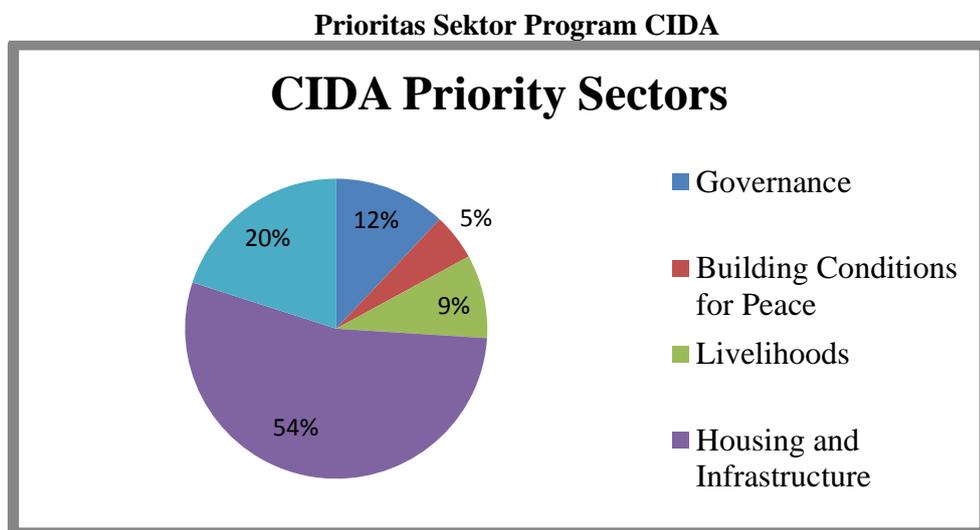
Sebagai *development assistance* yang merupakan penghubung hubungan bilateral antara Indonesia dan Kanada, *Development Assistance* lebih memantau bagaimana program tersebut berjalan dalam memfasilitasi bantuan. Meskipun bukan salah satu pedonor terbesar, CIDA telah memberi peran yang lebih dari

³ Canadian International Development Agency, *Tsunami Final Executive Report 11 January 2010*, hlm 25

bantuan negara berkembang dalam negara yang masih hidup dalam kemiskinan. Namun juga sebagai lembaga yang ikut berkontribusi membangun kembali Aceh pasca kejadian 26 Desember 2004, dengan merencanakan *Aid Effectiveness Action* dalam strateginya.

Program *Aid Effectiveness* perlu adanya kerjasama yang baik dengan beberapa LSM untuk tercapainya pembangunan masyarakat di Aceh. Tidak hanya dialog antar masyarakat namun juga dengan LSM yang ikut membantu dalam pembangunan Aceh. Agar terciptanya kemampuan kapasitas sosial yang baik dalam berinteraksi dengan korban dari Tsunami Aceh. Dalam hal ini CIDA memiliki beberapa program utama dalam penanggulangan bencana tsunami sebagai berikut:

Diagram 4.1



Sumber : Canadian International Development Agency, *Joint Statement of Achievement: Tsunami Recovery Program*

Berdasarkan grafik diatas bahwa prioritas utama CIDA dalam pembangunan, karena dampak dari tsunami merupakan hancurnya infrastruktur daerah. Dalam pembangunan kembali Aceh, CIDA bekerjasama dengan BRR agar bantuan yang diberikan dapat terkoordinasi baik dan tepat sasaran.

B. Pelaksanaan Program Aid Effectiveness di Aceh

Dalam pelaksanaan program *Aid Effectiveness* CIDA bekerjasama baik antar pemerintahan maupun beberapa NGO yang ikut serta dalam pembangunan pasca tsunami di Aceh, maka dapat dilihat sebagai berikut:

1. Tata Kelola Pemerintahan

Dilatar belakangi oleh kondisi pasca tsunami yang membuat kerusakan infrastruktur & fasilitas pemerintah dan membuat pelayanan terhadap masyarakat mengalami penurunan. Tsunami telah memberi dampak pada administrasi pemerintahan khususnya pemerintahan daerah, kerugian pada sektor pemerintahan dengan tenaga sipil yang menjadi korban, gedung, pemerintahan, fasilitas dan catatan publik yang hilang atau hancur. Maka dari itu perlu adanya kerjasama dalam tata kelola pemerintahan sehingga dapat memperbaiki layanan masyarakat. Sehingga CIDA berkoordinasi dengan beberapa pemerintahan daerah di Aceh agar meningkatkan kemampuan pada melayani masyarakat Aceh. Berikut hasil kerjasama dalam tata kelola pemerintahan (*Governance*) dari CIDA:

Tabel 4.2

Hasil dari Kerjasama Dalam Bentuk Tata Kelola Pemerintahan Oleh CIDA⁴

1. Meningkatkan Kemampuan	
- Demokratis, transparan, mengambil keputusan secara inklusif dan manajemen eksekutif dan pemerintahan legislative	Dalam program “ <i>Emergency Response and Transitional Recovery</i> ” bekerjasama dengan <i>United Nations Development Programme</i> (UNDP) memfasilitasi pemulihan cepat pada fungsi pemerintahan, persiapan pilkada serta pelatihan evaluasi “Analisa Dampak Lingkungan” dan memonitor serta dalam kesiap-siagaan bencana alam untuk kabupaten Aceh Jaya dan Aceh Barat pada tahun 2006.
- Meningkatkan kemampuan kelompok masyarakat untuk memengaruhi kapasitas pemerintahan	CIDA bekerja sama dengan <i>Unitarian Service Committee</i> (USC) Canada dan Yayasan Persahabatan Indonesia Kanada (YAPPIKA) membentuk <i>Acehnese Civil Society Strengthening Project</i> (ANCORS) sebagai LSM untuk membangun kapasitas 7 kabupaten pada tahun 2006
- Pelatihan kemampuan pemerintahan daerah sistem manajemen keuangan dengan komputer dan menambahkan hasil secara transparan dan pengambil keputusan di pemerintah daerah	Dengan proyek “ <i>Governance Reform Support II Project</i> ” CIDA memberikan fasilitas sistem komputerisasi dalam manajemen keuangan dan pelatihan kepada 1500 <i>personal accounting</i> di 21 pemerintahan daerah Aceh pada tahun 2009.

2. Peningkatan Pada Proses	
- Memperkuat proses pada pengambilan keputusan dan manajemen pembangunan	Dengan proyek <i>Canada Aceh Local Government Assistance Project</i> (CALGAP) bekerjasama dengan <i>The Federation of Canadian Municipalities</i> staf pemerintahan kabupaten Pidie dan Aceh Jaya memperoleh bantuan teknis diberbagai bidang tata kelola pemerintahan, termasuk perencanaan dan pembuatan anggaran, pengelolaan taman, dan lingkungan. Program ini mulai dilakukan pada tahun 2006.
- Masukan dari diskusi umum, pertemuan antar stakeholders, survei atau mekanisme penangan komplain	CIDA bekerja sama dengan USC Canada dan YAPPIKA membentuk ANCORS sebagai LSM untuk membangun kapasitas 7 kabupaten pada tahun 2006
- Transparan dan proses yang sistematis pada dana	Dengan proyek “ <i>Governance Reform Support II Project</i> ” CIDA dengan pelatihan

⁴ Hasil Wawancara dengan Mr. John Summerbell *Head of Project* CIDA pada 23 Desember 2016

proposal	meningkatkan transparansi anggaran. Hingga saat ini 20 dari 22 pemerintahan daerah di provinsi NAD
- Penambahan barang (komputer, kendaraan, perabotan kantor) disediakan agar semakin efisien pada proses setiap program	Dengan proyek <i>Canada Aceh Local Government Assistance Project (CALGAP)</i> bekerjasama dengan <i>The Federation of Canadian Municipalities</i> dengan pengadaan kendaraan, selain itu bantuan teknis dan keuangan yang diberikan melalui Asosiasi Kotamadya Kanada. Proyek ini dilakukan pada daerah Banda Aceh dan Pidie.

3. Kerjasama Yang Sehat dan Lebih Mendalam	
- Memperkuat hubungan antara masyarakat dan pemerintah	CIDA bekerja sama dengan USC Canada dan YAPPIKA membentuk <i>Acehnese Civil Society Strengthening Project (ANCORS)</i> sebagai LSM untuk membangun kapasitas 7 kabupaten pada tahun 2006
- Senior district level officers menghubungi komunitas masyarakat, meningkatkan kedua grup agar saling memenuhi kebutuhan	CIDA bekerja sama dengan USC Canada dan YAPPIKA membentuk ANCORS sebagai LSM untuk membangun kapasitas 7 kabupaten pada tahun 2006
- Bersama Universitas IAIN di Banda Aceh mengembangkan program mengenai kesetaraan gender	Dengan Program “Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Social Equity Project” oleh Universitas McGill dan IAIN membangun kembali Ar-Raniry kapasitas untuk mempromosikan program pendidikan yang kesetaraan gender, pembuatan program baru di bidang sosial, pengembangan masyarakat, hukum, pelatihan guru dan kajian/kuliah, perpustakaan. Selain itu mengirimkan 125 staff ke Kanada untuk melakukan pelatihan manajemen universitas, mediasi, study tentang perempuan dll.

Dalam tabel tersebut menjelaskan bahwa CIDA merespon dengan proyek pemerintahan yang bertujuan untuk mengembalikan kapabilitas pemerintahan, dengan membangun kembali organisasi masyarakat dan memperkuat hubungan

antara pemerintahan dan masyarakat. Selain itu juga memberi fasilitas peralatan kantor agar kemampuan pada pelayanan pada masyarakat semakin meningkat.

Proses pembangun dalam sektor *Governance*, sebagai proses yang dinamis dalam penerapannya di Aceh. Walaupun mengalami tantangan dalam mengaplikasikannya. Namun dalam realisasinya program yang dilakukan yang bersifat akuntabilitas, transparan, inklusif, dan banyaknya masyarakat dalam berperan bagaimana pembangunan keberlanjutan Aceh. Selain itu, banyak masyarakat yang merespon baik karena banyak yang ikut serta berperan dalam upaya tata kelola pemerintahan Aceh selanjutnya untuk kedepannya dalam melayani masyarakat.

2. Penghidupan

Pasca tsunami tidak hanya meninggalkan korban yang kehilangan anggota maupun kerabat keluarga, namun juga mata pencarian sebagian masyarakat Aceh juga hancur. Kerugian dari tsunami Aceh mencapai 20.000 hektar dalam sektor perikanan, 60.000 hektar dari peternakan baik lahan secara peminjaman maupun permanen yang menjadi tidak produktif, serta 100.000 usaha kecil dan menengah yang hancur.⁵ Pemerintahan Indonesia tidak mampu untuk membangun kembali Aceh sendiri, sehingga perlunya bantuan dari negara lain maupun LSM untuk juga berkontribusi dalam pembangunan Aceh. Dalam program ini proyek ini penting diadakan pembangunan keberlanjutan dari segi sumber daya manusia. Sehingga mampu meningkatkan perekonomian di Aceh, sehingga CIDA berkoordinasi

⁵ Canadian International Development Agency, *Lesson From A Post-Disaster Reconstruction Experience*, hlm 8

dengan masyarakat yang merupakan korban selamat. Berikut adalah hasil kerjasama CIDA dalam pembangunan berkelanjutan:

Tabel 4.3
Hasil dari Kerjasama Dalam Bentuk Livelihoods Oleh CIDA⁶

1. Dukungan Secara Langsung
<ul style="list-style-type: none"> - 150 <i>Economic Recovery Groups</i> (ERG) melakukan pelatihan di 3 distrik yang diikuti oleh 1783 masyarakat - 46.000 masyarakat menerima dana dengan bisnis material, hibah pada 15 distrik di Aceh dan 2 distrik di Nias - Penanaman 36 bibit pada 3 distrik di Aceh
2. <i>Capacity Building</i>
<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan pada kemampuan kewirausahaan serta pelatihan produsen/pengusaha dalam manajemen produksi dan teknik marketing, 50% perempuan - Pelatihan pada calon dan pengusaha yang terlatih, 60 % wanita, melalui Proyek "<i>Private Enterprise Participation</i>" (PEP) dengan pinjaman lebih dari \$130.000 pada 122 anggota - CIDA bekerjasama dengan <i>International Labour Organizations</i> (ILO) melakukan pelatihan lebih dari 2200 usaha mampu untuk memberikan layanan pengembangan bisnis

Dalam tabel ini menjelaskan bahwa pihak CIDA melakukan berbagai pelatihan khususnya untuk perempuan dengan mengembangkan keterampilan dalam membuka usaha kecil dengan sumber daya yang ada, serta melakukan berbagai pelatihan dalam teknik marketing dan produksi bagi para produsen. Sehingga produsen mendapat keuntungan, yang juga sebagai pertumbuhan perekonomian di Aceh.

⁶ Hasil Wawancara dengan Mr. John Summerbell Head of Project CIDA pada 23 Desember 2016

CIDA dalam sektor ini sebagian besar memberikan pelatihan khusus pada masyarakat agar lebih terampil, selain itu juga memberikan modal usaha agar pemulihan perekonomian di Aceh. Dalam proyek ini CIDA mengalami kesulitan dalam menangani wilayah bekas konflik karena sebagian buta huruf serta lebih condong ketergantungan dalam bantuan.

3. Peacebuilding

Pasca tsunami disamping kerugian yang besar didapat namun juga permasalahan sosial, ekonomi dan politik belum terselesaikan yang telah berlangsung lama. Perang saudara antar Pemerintah RI dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang menghancurkan kepercayaan dan kerjasama antara pemerintahan dan masyarakat di seluruh provinsi. Konflik yang terjadi selama 30 tahun ini telah mengakibatkan terjadinya komunitas yang terpecah belah, selain itu juga tantangan mengasimiliasi kembali mantan kombatan dan tahanan politik ke dalam struktur-struktur masyarakat. Hal ini juga dalam kegiatan rekonstruksi menjadi tantangan bagi lembaga pendonor dalam berpartisipasi distribusi memberikan bantuan. Karena kurangnya kepercayaan masyarakat, sehingga perlu adanya kerjasama dengan pemerintah daerah serta masyarakat madani.

Proyek ini ditujukan bagi upaya penciptaan perdamaian melalui berbagai kegiatan pendidikan, partisipasi masyarakat dan pemulihan mata pencaharian. Selain itu CIDA juga berperan sebagai untuk mencegah dan mengurangi konflik melalui penyediaan tempat atau forum untuk upaya musyawarah dan pengambilan

keputusan di tingkat masyarakat, dan penyediaan lebih banyak kesempatan kerja bagi para korban dan pelaku konflik. Berikut tabel yang menunjukkan bagaimana kontribusi CIDA dalam bentuk perdamaian:

Tabel 4.4
Hasil dari Kerjasama Dalam Bentuk Perdamaian Oleh CIDA⁷

Meningkatkan Kapasitas dan Proses
<ul style="list-style-type: none">- 1650 murid mendapatkan edukasi tentang perdamaian di 30 sekolah umum- 52 guru mendapat pelatihan- 460.000 orang telah meningkatkan kemampuan pada kemampuan perempuan dan kelompok masyarakat di 396 pedesaan

Dalam hal ini CIDA membangun kapasitas dalam menyebarkan nilai-nilai perdamaian dengan mendirikan sekolah serta guru yang mempunyai keterampilan khusus untuk daerah seperti Aceh yang mempunyai konflik internal. Sehingga anak-anak yang sebagai generasi penerus bangsa tidak terlibat dengan konflik tersebut.

Konflik internal yang dialami antara masyarakat Aceh dengan pemerintahan Indonesia berakhir pada setelah ditanda tangannya Perjanjian Helsinki. Masyarakat sebagai mantan pejuang GAM mengalami kerumitan dalam menyesuaikan diri. Sehingga dalam hal ini CIDA juga bekerjasama dengan *International Organization for Migration* (IOM) fokus pada memberikan pelatihan keterampilan dan memberikan kebutuhan pokok untuk masyarakat mantan pejuang. CIDA sebagai fasilitator, telah menjalankan program pada 379

⁷ Ibid

desa memiliki kesempatan untuk tumbuh kepercayaan dan rekonsiliasi setelah mengalami hubungan yang pahit.⁸

CIDA membentuk diskusi kelompok dalam penanggulangan bencana Aceh. 93% masyarakat puas dengan proyek yang dilakukan oleh CIDA, terlebihnya dengan sifat inklusif dalam pemilu. Meskipun belum pemulihan secara merata namun masyarakat Aceh puas dengan strategi yang dilakukan oleh CIDA lebih menekankan pada perdamaian dan kerjasama yang baik.

4. Perumahan dan Infrastruktur

Pasca tsunami Aceh, sebagian telah merugikan masyarakat Aceh yang harus kehilangan keluarga dan harta benda. Selain itu infratrstruktur daerah yang rusak juga memengaruhi akses warga untuk beraktivitas sehari-hari. Korban dari tsunami juga kehilangan tempat tinggal, sehingga dalam hal ini sebagai agen bantuan pemerintahan Kanada memberikan bantuan dari shelter hingga rumah permanen bagi korban bencana tsunami. Dalam sektor ini CIDA bekerjasama dengan beberapa mitranya seperti *World Renew*, *Canadian Red Cross* (CRC) dan UNDP.

Pasca kejadian Tsunami Aceh, lembaga CIDA mengirimkan bantuan pertama kalinya yaitu fasilitas air dan sanitasi. Hal ini CIDA juga bekerjasama dengan lembaga *World Renew* dalam memberikan akses air bersih dan fasilitasi sinatasi di Indonesia. Dengan membangun akses air bersih dan fasilitas sanitasi mencapai 3.384 orang, yang membangun 15 Sumur di 15 dari 28 desa di Meunasah Cot,

⁸ CIDA, *Tsunami Reconstruction and Rehabilitation Program : Executive Evaluation Report*, hlm 18

Kecamatan Lhoong, Aceh, Indonesia.⁹ Dalam hal ini upaya yang telah dilakukan oleh CIDA dalam pembangunan kembali perumahan dan infrastruktur yang akan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.5
Housing & Infrastructure CIDA¹⁰

No	Housing & Infrastructure	Unit
1	Rumah Permanen	6.868
2	Pembangunan Sumur	1035
3	Pembangunan Sanitasi	1302
4	Pembangunan Jembatan	852
5	Pembangunan Drainase	1075 (km)
6	Pembangunan Jalanan	2529 (km)
7	Pembangunan Sekolah	282
8	Pembangunan Klinik Kesehatan	43
9	Water Disposal (Tsunami Waste Removed)	113557 m ²
10	Water Disposal Units	262

Sumber : CIDA, Joint Statement Achievement Tsunami Recovery program, 15 April 2009

Upaya CIDA dalam membangun *Housing & Infrastructure* ini dilakukan oleh beberapa NGO seperti UNDP, maupun berkolaborasi dengan Bank Dunia, air sanitasi dan kesehatan untuk warga dengan Bank Pembangunan Asia. Selain itu BRR juga sebagai lembaga pemerintahan Indonesia yang memonitor dan melakukan audit dengan jumlah bantuan yang ditampung dari berbagi kalangan. Agar tercapainya CIDA sebagai lembaga pemerintahan Kanada, sehingga mampu

⁹ CIDA, *Indian Ocean Tsunami CIDA Tsunami Response Programming Progress Report Dec.2006*, hlm 9

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Mr. John Summerbell (*head of project CIDA*) *Joint Statement Achievement Tsunami Recovery Program* pada 23 Desember 2016

berkoordinasi dengan lembaga BRR. Jumlah dari dana pada sektor ini mencapai \$155.363.518 berikut jumlah pengeluaran CIDA pasca tsunami Aceh.¹¹

Beberapa program yang diberikan oleh CIDA untuk masyarakat Aceh, lebih kepada program bersifat jangka panjang. Karena fokus utama CIDA pada *Capacity Building* dengan memperkuat hubungan individu, komunitas, dan pemerintahan daerah yang berperan di masyarakat nantinya. Dalam proyek perumahan, CIDA tidak hanya membangun rumah saja, namun juga membangun rumah yang sesuai dengan kualitas Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dengan prinsip ‘pembangunan kembali yang lebih baik’ di desain tahan terhadap gempa. Namun setelah dibangun hunian perumahan, masyarakat tidak langsung menempati hunian tersebut. Karena keterlambatan instalasi fasilitas air dan sanitasi oleh Palang Merah Amerika Serikat. Namun pada akhirnya masyarakat puas dengan pembangunan yang dilakukan, karena pembangunan tersebut bersifat transparansi dan di desain dengan rumah model tahan gempa.

Berdasarkan uraian pada bab ini, dapat disimpulkan bahwa kerusakan pasca tsunami telah merugikan baik secara psikis maupun fisik. Berbagai respon dilakukan oleh berbagai pihak baik dari nasional maupun internasional. Salah satunya pemerintahan Kanada dengan mengirimkan CIDA sebagai *development assistance* dalam pembangunan kembali di Aceh. Dengan sedikitnya pengalaman CIDA dalam penanganan bencana alam, namun melihat jumlah kerugian pasca tsunami yang sangat besar dan pemerintahan Indonesia tidak

¹¹ CIDA, *Tsunami Reconstruction and Rehabilitation Program Executive Evaluation Report*, hlm. 32

mampu menyelesaikan dengan sendirinya. Sehingga CIDA juga ikut membantu dalam penanganan tsunami. Bantuan yang pertama kali saat itu diberikan yaitu bantuan tanggap darurat yang datang pada saat 24 jam setelah kejadian Tsunami Aceh. Saat itu bantuan yang diberikan berupa fasilitas sanitasi dan air bersih, kebutuhan dasar, serta kesehatan yang bekerjasama NGO seperti *World Renew* dan ICRC.

Modal Sosial sebagai salah satu hal terpenting pada manajemen bencana. Dalam menjalankan program CIDA sebagai *Linking Social Capacity* untuk bekerjasama dengan berbagai organisasi maupun perangkat masyarakat. Hal ini agar dapat tercapainya pembangunan di Aceh yang dilakukan oleh pemerintahan Kanada. CIDA menggunakan *Aid Effectiveness* untuk menjalankan program pembangunan di Aceh, yang fokus utamanya pada *Governance, Livelihoods, Housing & Infrastructure*, dan *Peacebuilding*. Program ini berjalan selama periode 2005 hingga 2009.¹²

Bantuan *Aid Effectiveness* yang diberikan oleh CIDA, sebagian sesuai dengan strategi pada beberapa sektor. Dalam kinerja manajemen respon bahwa strategi pada negara tujuan mencapai 92% yang sesuai dan masyarakat Indonesia program yang dijalankan dengan baik.¹³ Selain itu respon yang baik dari masyarakat yang berpartisipasi dan khususnya pada penerapan transparansi serta akuntabilitas mampu bekerja dengan baik.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa melalui program-programnya CIDA menjalankan *Aid Effectiveness* yang berperan sebagai fasilitator dalam

¹² CIDA, *Joint Statement of Achievement: Tsunami Recovery Program*, hlm. 4

¹³ Canadian International Development Agency, *Tsunami Final Executive Report 11 January 2010*, hlm 37

penanggulangan bencana pasca tsunami, pada tahun 2009 beberapa program yang ditawarkan untuk masyarakat Aceh yang bersifat jangka panjang. Dalam hal ini CIDA juga berkoordinasi dengan beberapa NGO baik dari dalam maupun luar negeri, seperti BRR, YAPPIKA, IOM, ILO, CALGAP, UNDP, CRC, *World Renew* dan lembaga pendidikan seperti IAIN dan Universitas McGill Canada.